



Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Ali Fahmi

Sosialisasi Masif, Bentuk Posko Pendampingan PPDB

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tak lama lagi segera bergulir. Sesuai kewenangannya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta bakal melaksanakan PPDB bagi siswa SD dan SMP. Terkait dengan itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Ali Fahmi mewanti-wanti agar PPDB diinformasikan sejak awal ke masyarakat.



Mereka yang mengalami kesulitan mendaftar harus didampingi," **MUHAMMAD ALI FAHMI** Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta

"SOSIALISASIKAN secara masif," pinta Muhammad Ali Fahmi dalam sebuah perbincangan mengupas Persiapan PPDB 2024 SD dan SMP Kota Yogyakarta yang diselenggarakan baru-baru ini. Wakil rakyat yang tinggal di Kotagede ini mengatakan, belajar dari pengalaman tahun lalu sosialisasi melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pemangku kepentingan digandeng. Antara lain pengurus RT, RW dan Tim Penggerak PKK. "Tahun lalu sudah masif. Kami ingin 2024 ini juga dilakukan," ungkapnya.

Fahmi juga menyoroti setiap PPDB, dinas selalu membentuk posko pengaduan. Harapannya posko itu benar-benar berfungsi. Setiap aduan yang masuk harus ditindaklanjuti. Tak sekadar hanya menjadi papan nama saja. Dia menilai, dinas tak cukup hanya membentuk posko pengaduan. Namun yang dilakukan juga perlu membuat posko pendampingan. Fungsi posko pendampingan itu dalam rangka membantu dan mendampingi masyarakat yang merasa kebingungan mengikuti PPDB. Sebab, pelaksanaan PPDB memakai sistem online. "Mereka yang mengalami kesulitan mendaftar harus didampingi," harapnya. Dengan demikian, jangan sampai terjadi siswa tidak dapat diterima di SMP negeri hanya gara-gara kesulitan cara mendaftar. "Harus ada pendampingan termasuk dari sekolah asal," sambung wakil




REGULASI BARU: Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 tingkat SMP di Kota Yogyakarta ada aturan zonasi radius. Ini hal yang perlu diketahui orang tua dan siswa. Selain itu juga ada zonasi daerah.

ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019 ini. Fahmi menceritakan pengalamannya tahun lalu. Ada siswa yang akan masuk SMA/SMK mengalami kesulitan karena bingung saat mendaftar secara online. Akibatnya, masa pendaftaran lewat. Siswa tersebut tak bisa masuk sekolah yang diinginkan. "Meski kejadian semacam itu terhitung jarang, tapi jangan sampai terulang," ucapnya. Dia mengaku kala itu mendapatkan pengaduan setelah PPDB selesai. Fahmi menegaskan, regulasi zonasi radius maupun zonasi daerah bukan dalam rangka menurunkan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta. Sebaliknya, justru dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu. "Sebagai kota pendidikan, Kota Jogja masih menjadi primadona

dan incaran. Itu menjadi tren," imbuh Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dhan Novitasari yang memandu jalannya diskusi. DPRD Kota Yogyakarta juga memberikan dukungan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama PPDB berlangsung. Assessment memerlukan komputer dan perangkatnya. Semua dipenuhi melalui kebijakan anggaran yang diputuskan dewan. Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Data, dan Informasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Mannarima juga hadir sebagai narasumber. Dia mengungkapkan, PPDB 2024 ini ada regulasi baru. Itu berkaitan dengan adanya ketentuan zona radius di samping zona daerah. "Zona radius diukur dari jarak rumah dan sekolah," terangnya. Selanjutnya, PPDB juga mensyaratkan hal khusus. Anak yang terdaftar dalam kartu keluarga (KK) harus punya hubungan darah anak atau cucu. "Bukan famili lain," terangnya. Di samping itu, ada surat pernyataan yang menjelaskan domisili anak sesuai yang tercantum dalam KK. Semua kebijakan itu, sambung Mannarima sebagai upaya melindungi warga Kota Yogyakarta. Dia juga mengatakan, bila saat pendaftaran, ada siswa yang memenuhi persyaratan yang sama, misalnya menyangkut jarak, maka akan dicermati dari sisi pilihan sekolah. **(kus/fj)**

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005